

ABSTRAK

Konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan yang terjadi di Semenanjung Korea berlangsung sudah cukup lama. Pada tahun 1953 konflik di Semenanjung Korea berakhir dengan adanya Perjanjian Gencatan Senjata (*Korean Armistice Agreement*). Namun pada tahun 2010 Korea Utara menyerang Pulau Yeonpyeong yang terletak di Korea Selatan dengan ratusan artilerinya. Tindakan yang dilakukan Korea Utara dikarenakan adanya latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dengan tindakan yang dilakukan, Korea Utara harus bertanggungjawab atas yang terjadi di Pulau Yeonpyeong. Permasalahan yang akan diteliti adalah peran Dewan Keamanan PBB dalam menindaklanjuti penyerangan yang dilakukan Korea Utara dan pertanggungjawaban negara Korea Utara atas tindakan yang telah dilakukan terhadap Pulau Yeonpyeong.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa tindakan Korea Utara terhadap Pulau Yeonpyeong merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB dimana peran Dewan Keamanan PBB dalam menangani tindakan Korea Utara terhadap Korea Selatan ini dengan menerbitkan Laporan Penyelidikan Khusus serta Korea Selatan dapat menuntut pertanggungjawaban negara dari Korea Utara atas apa yang telah dilakukan di Pulau Yeonpyeong.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Negara, Korea Utara, Pulau Yeonpyeong

ABSTRACT

The conflict between North Korea and South Korea which took place on the Korean Peninsula lasted quite a long time. In 1953, the conflict on the Korean Peninsula ended with the Korean Armistice Agreement. But in 2010 North Korea attacked Yeonpyeong Island in South Korea with hundreds of artillery. The actions taken by North Korea are due to joint military exercises conducted by South Korea and the United States. With the action taken, North Korea must be responsible for what happened on Yeonpyeong Island. The issues to be examined are the role of the UN Security Council in following up on North Korea's attacks and North Korea's accountability for actions taken on Yeonpyeong Island.

The used method approach is normative juridical, the research specification used is descriptive analytical. Data analysis method in this research is qualitative method. Data collection method is done by literature study.

This paper conclude that North Korea's action against Yeonpyeong Island is an act contrary to Article 2 Paragraph (4) of the United Nations Charter in which the role of the UN Security Council in dealing with North Korea's actions against South Korea by publishing Reports of Special Investigations and South Korea can hold the state accountable from North Korea for what has been done on Yeonpyeong Island.

Keywords: Responsibility State, North Korea, Yeonpyeong Island